

BERJUANG MENDAPATKAN BK CPO

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
Peneliti dan Pengamat Ekonomi Pedesaan
Lembaga Penelitian Universitas Riau

Perkembangan aktivitas perkebunan kelapa sawit di Daerah Riau juga diikuti oleh peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya berupa CPO, juga terjadi meningkatkan ekspor CPO. Pada awalnya diberlakukan pungutan ekspor bertujuan untuk menstabilkan harga dan kebutuhan bahan baku dalam negeri. Namun saat ini sudah merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pungutan pajak ekspor dan bea keluar CPO. Dengan adanya pungutan ekspor CPO yang sekarang dinamakan Bea Keluar CPO (BK CPO) merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Sampai saat ini masih diberlakukan.

Sejak diberlakukan kebijakan BK CPO, sampai saat ini belum ada ketentuan untuk pembagian hasil bagi daerah penghasil. Tingginya pungutan BK CPO yang diperoleh oleh pemerintah pusat merupakan kecemburuan bagi daerah penghasil. Seharusnya BK CPO yang dipungut oleh pemerintah sebaiknya didistribusikan kembali kepada daerah penghasil CPO dalam bentuk dana bagi hasil (DBH). Jika hal tersebut dilakukan tentu akan dapat dimanfaatkan bagi daerah penghasil untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur sebagai pendukung produktivitas kelapa sawit di daerah penghasil. Dari sisi lain juga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama yang berada di pedesaan.

Berdasarkan data perkebunan Daerah Riau, Provinsi Riau sebagai daerah penghasil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit memiliki luas lahan 2.258.553 ha dengan tingkat produksi minyak sawit sebesar 7.047.221 ton CPO pada tahun 2012. Propinsi Riau merupakan daerah yang memiliki produksi kelapa sawit tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan kontribusi Riau terhadap pembangunan ekonomi cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari sumbangan Pajak Ekspor Crude Palm Oil (PE-CPO) sebesar Rp71 triliun ke pemerintah pusat tahun 2010. Bea Keluar (BK CPO) sebesar Rp 3,65 triliun. Tahun 2011 Riau kembali menyumbang melalui BK CPO sebesar Rp 13,00 triliun dan tahun 2012 kontribusi Riau melalui BK CPO sebesar Rp 7,46 triliun.

Besarnya kontribusi Riau tersebut, Pemerintah Daerah Propinsi Riau melalui Dinas Pendapatan Daerah memperjuangkan adanya pembagian yang adil terhadap BK CPO tersebut. Dimana dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dari berbagai aspek, terutama yang terkait dengan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Paling tidak ada beberapa alasan perlunya DBH perkebunan perlu di perhitungkan untuk dikembalikan ke daerah penghasil guna pembangunan daerah dari berbagai aspek, antara lain: aspek ekonomi, aspek sosial, aspek kesehatan, aspek lingkungan, aspek teknis, aspek penguasaan teknologi dan penelitian.

Dalam usaha pengembangan kelapa sawit dan produk turunannya, maka diperlukan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) terutama dibidang penelitian baik di bidang *engineering* dan *manufacturing* teknologi industri hasil kelapa sawit (IHKS). Begitu juga untuk pengembangan dan inovasi masih terbatas. Rendahnya dana riset, kurangnya kolaborasi dan sinergi lembaga research, tidak adanya database jumlah dan kapasitas SDM baik pada litbang, perguruan tinggi dan perusahaan. Ke depan diperlukan database yang lengkap yang mampu memberikan informasi terkait dengan perkembangan kelapa sawit di Riau.

Seiring dengan pertumbuhan CPO dari tahun ke tahun juga meningkatnya pajak ekspor dan bea keluar (BK) CPO dari Daerah Riau, maka Daerah Riau akan selalu memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun dari sisi lain sudah sepatasnya pula Daerah Riau sebagai penghasil CPO terbesar di Indonesia memperoleh kembali pembagian dana bagi hasil dari BK CPO. Dimana dana tersebut akan digunakan sebagai pembinaan dan pemeliharaan

perkebunan kelapa sawir di Riau. Diharapkan pembagian kembali dana BK CPO tersebut dapat dikembalikan kepada usahatani kelapa sawit sebagai produser guna meningkatkan pendapatan petani dan penghasilan yang lebih besar dimasa yang akan datang.

Diharapkan pemerintah pusat berkenan mempertimbangkan kembali dana bagi hasil BK CPO untuk daerah penghasil CPO di Indonesia. Dana yang dimaksud oleh daerah penghasil akan digunakan untuk pemberdayaan kelapa sawit ke depan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kebun, terutama kebun kelapa sawit rakyat yang mencapai 53% dari total luas kebun yang ada di Riau atau sekitar 1.197.033 ha. Dari luas kebun tersebut sebagian besar merupakan usahatani yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Dari hasil kajian pembagian dana bagi hasil BK CPO oleh pemerintah daerah khususnya akan digunakan untuk keperluan, antara lain: 1) peremajaan kebun kelapa sawit yang sudah mencapai siklus pertama (25 tahun); 2) bantuan pupuk subsidi bagi petani kelapa sawit; 3) penggantian bibit palsu bagi petani swadaya; 4) pencegahan kebakaran kebun; 5) perbaikan jalan produksi di pedesaan; 6) pemberdayaan dan peningkatan kinerja lembaga keuangan petani; 7) pembinaan masyarakat petani dan pencegahan konflik sosial, dan 8) pengembangan inovasi produk kelapa sawit yang terkait dengan industri hulu-hilir melalui penelitian dan pengembangan oleh lembaga dan badan kajian.

Berdasarkan permasalahan dan kendala dalam menghadapi perkembangan perkebunan kelapa sawit ke depan, diharapkan pemerintah pusat mempertimbangkan pembagian dana bagi hasil BK CPO yang akan dimanfaatkan untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan kebun kelapa sawit ke arah yang lebih baik. Untuk itu diperlukan dana yang bersumber dari pembagian hasil BK CPO. Dari hasil kajian dan prediksi sederhana kebutuhan dana yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan dan pembinaan perkebunan kelapa sawit disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi Rencana Kebutuhan Biaya Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang Bersumber dari BK CPO Tahun 2014-2020 (dalam juta)

Tahun	Peremajaan	Pupuk	Penggantian Bibit	Perbaikan Jalan	Penelitian/ Inovasi	Jumlah
2014	3.224.707,62	98.853,85	124.456,28	5.229,26	5.521	3.458.768,39
2015	4.014.632,74	117.208,68	147.564,88	6.665,22	5.935	4.292.007,00
2016	4.976.648,69	138.376,27	174.214,73	8.459,11	6.381	5.304.079,46
2017	6.222.078,88	164.767,23	207.440,76	10.827,86	6.859	6.611.973,94
2018	7.447.081,88	187.815,82	236.458,76	13.268,21	7.374	7.891.998,31
2019	9.568.459,41	229.825,79	289.349,01	17.453,69	7.927	10.113.014,57
2020	10.591.809,44	242.291,18	305.042,85	19.780,38	8.521	11.167.445,01

Pengajuan pembagian dana BK CPO oleh Daerah Riau didasarkan pada rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit pada siklus kedua. Pada siklus pertama usahata perkebunan kelapa sawit telah terbukti memberikan dampak ekonomi terhadap ekonomi regional dan wilayah. Tapi dari satu sisi khususnya perkebunan rakyat untuk menghadapi siklus kedua tidak mempersiapkan modalkerjanya. Sehingga ke depan petani tidak punya modal untuk melakukan usahatani pada siklus kedua. Berdasarkan hasil prediksi sederhana dan mengacu kepada luas kebun pada siklus pertama (tahun tanam 1998) maka dibutuhkan dana peremajaan sebesar 3,224 triliun. Disamping itu diperlukan dana untuk pengembangan dan inovasi melalui hasil penelitian. Diharapkan kelapa sawit di Riau ke depan akan berkembang lebih baik dengan mengutamakan keselamatan lingkungan, pengembangan inovasi, penemuan produk-produk turunan yang bernilai ekonomi.